

Abstrak

Dalam penentuan prioritas kecamatan yang akan dimekarkan dalam suatu wilayah tidak dapat dilakukan dengan mudah, karena memerlukan pertimbangan-pertimbangan khusus terhadap setiap pemilihan kecamatan yang akan dimekarkan. Kesalahan dalam penentuan prioritas dapat menyebabkan program pembangunan otonomi daerah menjadi tidak sesuai dengan asas adil dan merata.

Data yang digunakan dalam SPPK (Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan) ini adalah data BPOD (Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah) dengan mengambil studi kasus Kota Bandung. Kriteria yang digunakan telah ditentukan oleh BPOD Kota Bandung dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2000. SPPK ini menggunakan metode AMK (Analisis Multi Kriteria). AMK merupakan suatu cara untuk melihat permasalahan yang kompleks yang dikarakteristikkan dengan penggabungan objective monetary dan non-objective monetary, membagi permasalahan kedalam bagian-bagian yang lebih dapat diatur yang datanya dibagi secara adil dan kemudian bagian-bagian tersebut disusun ulang untuk menghasilkan penggambaran yang koheren untuk pengambilan keputusan.

Tugas Akhir ini membuat SPPK yang dapat menentukan prioritas kecamatan yang akan dimekarkan dari yang terbaik ke yang terburuk sebagai rekomendasi bagi pemerintah daerah Kota Bandung. SPPK yang dibangun dapat membantu memberikan alternatif keputusan yang lebih berkualitas sesuai dengan tingkat membantu dari pihak BPOD Kota Bandung dari hasil kuisioner sebesar 85.71% dalam memberikan bantuan penentuan prioritas.

Kata kunci : SPPK, Pemekaran Kecamatan, AMK